

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Perilaku Politik**

Perilaku Politik dirumuskan sebagai kegiatan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Perilaku Politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Perilaku Politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik dalam jurnal (Sholikhah, 2014).

Sejalan dengan pengertian politik, Perilaku Politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut. Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi. Sebagian dari perilaku dan interaksi dapat dicermati akan berupa perilaku politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya dalam jurnal (Raoda Nur, 2015).

Dengan demikian Perilaku Politik merupakan tindakan masyarakat atau pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan atau pencapaian tujuan terkait

keputusan politik baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaannya. Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kandidat untuk mempengaruhi dan meyakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kandidat yang bersangkutan.

Dinyatakan sebagai pemilih dalam Pilkada yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih. Perilaku Pemilih adalah tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihan yang disukai. Perilaku pemilih dapat ditunjukkan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada secara langsung (Nasution, 2009). Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Sosiologi

Cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Kongretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. Pendekatan sosiologis secara logis terbagi atas model penjelasan mikro sosiologis dan model penjelasan makrososiologis. Model penjelasan mikrososiologis, dikembangkan oleh ilmuan politik dan dari Universitas Columbia, pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan Mazhab Columbia. Sementara model penjelasan makrososial menelaah perilaku pemilu di seluruh tingkatan atau

lapisan masyarakat secara keseluruhan hal mana pada akhirnya melahirkan suatu penjelasan mengenai terbentuknya sistem partai di eropa barat (Surbakti, 1992).

b. Pendekatan Psikologis

Konsep psikologi sosial yang dipergunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk kepada persepsi pemilih atau partai-partai politik yang ada atau adanya korelasi atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai-partai politik tertentu. Konkritnya, partai-partai politik yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya. Dalam hal pendekatan psikologis, seperti namanya, pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan pilihan karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi. Mereka menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai dalam mempengaruhi pemilih.

c. Pendekatan Rasional

Pada pendekatan ini isu-isu politik menjadi pertimbangan penting para pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Melihat kegiatan memilih sebagai produk kulkulasi untung dan

rugi. Yang di pertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang di harapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih, sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintahan. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi di gunakan untuk keputusan partai atau yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

## **2. Partisipasi Politik**

Dalam analisa modern, partisipasi politik merupakan masalah yang penting dan banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam hal pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Herbert Mc Closky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Armansyah, 2016).

Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang ikut serta aktif dalam kehidupan politik. Selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dan rezim yang sedang berkuasa. Partisipasi sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu:

a. Partisipasi aktif

Kegiatan berorientasi pada output dan input politik, yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah, mengajukan suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah.

b. Partisipasi pasif

Kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini menurut segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan (Kadir, 2017).

### **3. Komunitas**

Komunitas adalah sekelompok orang yang hidup di tempat yang sama, berpemerintahan sama dan mempunyai kebudayaan dan sejarah yang umumnya turun-temurun (Frazier Moore, 1987). Orang-orang yang hidup dalam komunitas dengan lembaga-lembaganya membuat mereka saling bergantung satu dengan lainnya. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang baik tanpa lembaga-lembaga tersebut. Begitu pula lembaga itu hanya

dapat hidup dengan ijin dan dukungan mereka. Komunitas dapat terbagi menjadi 3 komponen antara lain:

- a. Berdasarkan Lokasi atau Tempat Wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat dimana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis.
- b. Berdasarkan minat: Sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaan, suku, ras, maupun berdasarkan kelainan seksual.
- c. Berdasarkan Komunitas-komunitas (kelompok yang hidup bersama) dapat berarti ide dasar yang dapat mendukung komunitas itu sendiri (Crow dan Allan, 2018).

Jim Ife dan Frank Tesoriero mengungkapkan komunitas atau kata lain dari masyarakat yang terorganisir dimengerti sebagai suatu bentuk organisasi sosial dengan lima ciri antara lain:

- a. Skala Manusia

Pada dasarnya komunitas itu selalu berinteraksi satu sama lainnya. Dalam interaksi tersebut, terdapat skala yang melibatkan individu untuk mudah mengendalikannya dan menggunakannya. Jadi yang dimaksud skala manusia adalah skala dalam berinteraksi dengan individu lain hanya terbatas pada orang-orang yang dikenal saja atau berkenalan dengan orang lain bila diperlukan.

b. Identitas dan Kepemilikan

Dalam suatu kelompok yang mempunyai identitas diri yang menjadi sangat penting untuk memberi tahu kepada semua orang yang ada disekelilingnya. Bahwa mereka bagian dari komunitas tersebut yang juga mempunyai rasa memiliki terhadap kelompok yang dimilikinya.

c. Kewajiban-kewajiban

Dalam suatu komunitas tidak menutup kemungkinan bahwa setiap anggotanya juga harus memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai anggota komunitas. Kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan setiap komunitas. Oleh karena itu, setiap individu dituntut untuk berperan aktif dalam komunitas tersebut.

d. Gemeinschaft (Paguyuban)

Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh adanya hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal tidak ada unsur paksaan dari anggota paguyuban tersebut.

e. Kebudayaan

Setiap komunitas pasti akan memiliki kebudayaannya masingmasing. Kebudayaan ini merupakan identitas yang menjadikan komunitas itu memiliki ciri yang berbeda dengan

komunitas lain. Suatu komunitas mengandung tiga karakteristik antara lain:

1. Para anggota suatu komunitas berbagi identitas, nilai-nilai dan pengertian-pengertian.
2. Mereka yang di dalam komunitas memiliki berbagai sisi dan hubungan langsung, interaksi terjadi bukan secara terisolasi melainkan, melalui hubungan-hubungan tatap muka dan dalam berbagai keadaan atau tata cara.
3. Komunitas menunjukkan suatu resiprositas yang mengekspresikan derajat tertentu kepentingan jangka panjang dan mungkin bahkan altruism (mementingkan orang lain) kepentingan jangka panjang di dorong oleh pengetahuan dengan siapa seseorang berinteraksi, dan altruisme dapat dipahami sebagai suatu rasa kewajiban dan tanggung jawab (Firmansyah, 2008).

Salah satu bentuk komunitas adalah club motor. Klub Motor Klub motor adalah suatu wadah yang dapat menampung aspirasi serta keinginan para amggotanya berdasarkan musyawarah dan mufakat serta kesepakatan pada waktu awal pembentukan oleh para founder (pendiri)nya dan dapat dilakukan dengan cara berkumpul untuk melakukan kegiatan dengan maksud dan tujuan tertentu yang mempunyai struktur organisasi yang jelas dan mempunyai aturanaturan. Pada dasarnya suatu club itu akan hadir dari suatu hobi atau ketertarikan yang sama. Misalnya satu merk motor dari satu

pabrik, kesenangan dalam modifikasi dan kegiatan touring bersama. Klub motor identik dengan sesuatu hal yang maskulin (kelelakian), seperti kegarangan, keberanian, dan lainlain. Hal itu terlihat dari logo yang dibuat oleh komunitas dan club tersebut, cara berjabat tangan, atribut yang digunakan, pakaian yang dikenakan, dan lain-lain (Dinda Novia Candraningtyas, 2017).

#### **4. Pemilihan Umum**

Pemilu adalah salah satu barometer yang dipakai untuk mengukur seberapa besar partisipasi masyarakat dalam tatanan demokrasi. Pemilu menjadi suatu proses yang sangat penting bagi sebuah negara melalui pemilu dapat dibangun basis dan konsep demokrasi, karena tanpa pemilu, tanpa persaingan terbuka di antara kekuatan sosial dan kekuatan kelompok politik, maka tidak ada demokrasi (Eka Suaib, 2010). Maksudnya ialah untuk menyuburkan proses demokrasi yang sehat dibutuhkan pemilu yang bebas nilai dan kompetisi terbuka didalam kehidupan masyarakat dan pegiat politik. Pemilu juga melegitimasi sistem politik maksudnya ialah dengan adanya pemilu nantinya pergerakan calon yang terpilih akan lebih mudah melaksanakan sistem karena telah memperoleh kekuatan dukungan dari para pemilihnya. Pemilu mengabsahkan kepemimpinan politik, maksudnya ialah setelah selesai proses pemilu maka regenerasi tangkup kepemimpinan telah resmi berganti dan dapat menjalankan kepemimpinan yang baru.

Merujuk pada penjabaran fungsi-fungsi dan pentingnya pelaksanaan pemilu di atas menjadikan empat dimensi sarana yang bermanfaat bagi masyarakat agar memandang pemilu adalah proses penting bagi transformasi

perubahan baik itu ditinjau dari input, process, dan output pelaksanaan pemilu itu sendiri. Pelaksanaan itu pun merupakan implementasi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga partisipasi aktif adalah harga mati bagi identitas negara yang demokratis. Sehingga garis proses yang dibuat tidak terputus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat termasuk di daerah. Hingga saat ini, khususnya di era reformasi, terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang pemilu.

Proses penyelenggaraan pemilu dalam UU yang mengatur pemilu sesuai dengan empat (4) Parameter proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis yaitu; (1) Tersedianya kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi; (2) Memungkinkan setiap pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa adanya intimidasi; (3) Mampu menyediakan mekanisme dimana partai-partai berkompetesi secara sehat dan fair, dan (4) Mengadakan pemilu sebagai sarana damai untuk mengadakan suatu perubahan. Menurut R. William Liddle dalam (Efriza, 2012) mengemukakan bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut UU, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu. Selain itu Lawrence le Duc juga berpendapat bahwa pemilu adalah

sebuah lembaga politik yang mendorong (leads) dan mencerminkan banyak kecenderungan sosial, politik dan ekonomi. Meski pemilihan dan demokrasi bukan konsep yang sinonim, namun adanya pemilihan yang bebas dan kompetitif tidak pelak lagi di pandang sebagai salah satu cirri kritis yang menetapkan suatu bangsa sebagai bangsa demokratis. Dan Manuel juga berpendapat dalam (Efriza, 2012) Pemilu penting karena memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim yang baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilu yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila Pemilu dilaksanakan dalam konteks ini maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan. Bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu hal yang penting dalam penelitian. Bertujuan sebagai komparasi dan referensi bahkan sebagai bentuk pemetaan posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Ada beberapa karya ilmiah yang penulis temukan yang berkaitan dengan judul analisis Perilaku Politik komunitas motor Ninja Fans Club (NFC) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya.

*Pertama*, skripsi oleh Cice Verawati R.L mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin berjudul “Perilaku pemilihan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kolaka Utara”. Skripsi ini menjelaskan tentang perilaku politik perempuan, dalam hal ini pilihan politik perempuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan

politik tersebut. Pilihan politik perempuan dimaksudkan sebagai pilihan atau pemberian suara terhadap pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu, pilihan politik mencakup informasi dan pengetahuan seputar pemilihan yang diterima perempuan dan menjadi landasan ketika menggunakan hak pilihnya. Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang melibatkan warga negara biasa atau mengambil keputusan. Dalam hal ini, perempuan sebagai warga negara biasa yang ikut dalam kegiatan yaitu pemilihan calon legislatif. Perempuan yang terlibat dalam hal ini memiliki pilihan-pilihan politik untuk menjatuhkan pilihan politiknya kepada kandidat, ataupun tidak menggunakan hak pilihnya sesuai dengan informasi dan pemahamannya. Dalam pembahasan tentang perilaku politik perempuan dalam hal ini pilihan politik perempuan, kerangka konseptual dimasukkan teori pilihan rasional serta pendekatan sosiologis dan psikologis dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik perempuan. Pada pemilihan legislatif di Kolaka Utara tahun 2009, pemilih perempuan memiliki konteks yang berbeda-beda. Tiap perempuan memiliki lingkungan sosial dan proses sosialisasi yang berbeda-beda pula. Dalam sosialisasi lingkungan sosial perempuan, terjadi penyerapan nilai-nilai dan informasi yang diterima. Selain itu tingkat pendidikan sangat berkorelasi dengan akses informasi yang dipengaruhi bangunan pengetahuannya (Skripsi Cice Verawati R.L “Perilaku pemilih perempuan pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kolaka Utara”).

*Kedua*, skripsi oleh Putri Aulia mahasiswa Universitas Islam Negeri ArRaniry Darussalam Banda Aceh yang diselesaikan pada tahun 2018 berjudul “Perilaku politik pemilih pemula pada Pemilukada Aceh 2017 (Studi di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh) “skripsi ini menjelaskan tentang Perilaku memilih pemilih pemula pada pemilukada gubernur dan wakil gubernur tahun 2017, di kecamatan Syiah Kuala cenderung pada model sosiologi dalam menggunakan hak suaranya. Model sosiologi ini menjadi kecendrungan pilihan politik pemilih pemula, dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi oleh kerja agen sosialisasi dalam membentuk perilaku politik pemilih pemula, sedangkan faktor internal ialah tingkat kepercayaan pemilih pemula pada pemerintah dan kesadaran politik (Skripsi Putri Aulia “Perilaku politik pemilih pemula pada Pemilukada Aceh 2017 (Studi di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)”

*Ketiga*, skripsi oleh Dwidyawati Esther Mopeng mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi berjudul “Perilaku pemilih pada pemilihan kepala daerah Minahasa Utara Periode 2016-2021” Skripsi ini menjelaskan. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum adalah serangkaian kegiatan membuat keputusan yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Jikalau memutuskan untuk memilih, apakah memilih partai atau kandidat ataukah partai politik atau kandidat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih memilih karena ada kaitannya dengan pendidikan, jabatan atau pekerjaan dan jenis kelamin atau usia,

memilih dilihat dari keterkaitan seseorang dengan partai politik, orientasi seseorang terhadap isu-isu dan orientasi seseorang terhadap kandidat, memilih untuk tujuan diri sendiri dengan beberapa alternatif mana yang maksimal baginya, pemilih yang lebih melihat sosok figur dari kandidat calon kepala daerah, meski diberi barang berupa kebutuhan pokok atau dalam bentuk apapun, tidak mempengaruhi pemilih. Ada juga pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada umumnya karena banyak pemilih Desa Sawangan yang bekerja dan studi di luar daerah. Oleh karena itu perlu adanya pendidikan politik bagi masyarakat, bukan hanya pemilih tetapi seluruh lapisan masyarakat agar pemilih tidak salah pilih melainkan dapat menggunakan hak pilih dengan memilih calon yang tepat di waktu yang tepat (Skripsi Dwidyawati Esther Mopeng “Perilaku pemilih pada pemilihan kepala daerah Minahasa Utara Periode 2016-2021”).

*Keempat*, Jurnal yang diterbitkan Universitas Riau yang berjudul “Perilaku pemilih masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu) legislatif Kabupaten (Studi kecamatan Dayun, Dapil II kabupaten Siak, tahun 2014)” yang ditulis oleh Rizki Rahman Harahap. Jurnal ini menjelaskan tentang Perubahan perilaku pemilih masyarakat yaitu penggunaan hak dalam memilih pada pemilihan umum legislatif Kabupaten dengan meningkatnya angka partisipasi pemilih pada pemilihan legislatif periode 2014-2019 dibandingkan periode sebelumnya. Pendidikan politik masyarakat khususnya dalam penggunaan hak pilih sudah cukup baik, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesadaran setiap anggota masyarakat menggunakan hak pilihnya yang

termotivasi dari diri sendiri. Perilaku pemilih masyarakat pada pemilihan umum legislatif terpengaruhi oleh faktor sosiologis. Kesamaan suku antara pemilih dan yang dipilih menjadi landasan seseorang memberikan hak pilihnya (Jurnal Rizki Rahman Harahap yang “Perilaku pemilih masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu) legislatif Kabupaten (Studi kecamatan Dayun, Dapil II Kabupaten Siak, tahun 2014)”.)

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian diatas, maka yang jadi objek penelitiannya yaitu Komunitas Ninja Fans Club (NFC). Yang merupakan hal pertama yang akan menjadi perhatian peneliti tersebut. Kemudian diperlukan analisis untuk mengetahui secara rinci yang menjadi dasar penelitian yakni adanya perilaku politik, partisipasi politik, komunitas dan pemilihan umum.

**Tabel 2.1**

#### **Kerangka Pemikiran**

